

BUDAYA SEKSUAL DAN PENULARAN PENYAKIT AIDS*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Secara umum dapat disebut bahwa kampanye bahaya penyakit AIDS melalui media massa sudah berlangsung cukup gencar. Pemberitaan mengenai penderita, baik di luar maupun dalam negeri telah membuat penyakit ini "populer" dalam masyarakat. Majalah berita terkemuka di Indonesia, bahkan beberapa kali menjadikan masalah ini sebagai laporan utama.

Jika diikuti kisah-kisah melalui media massa, penderita dapat diklasifikasikan dalam 2 tipe, yaitu pertama penderita yang mendapat penyakit itu secara aktif. Ini akibat cara hidup yang memiliki pola yang khas. Dan kedua, korban yang memperoleh penyakit secara pasif, yaitu dari akibat berantai penyebaran penyakit. Mulai dari "kecelakaan" dalam transfusi darah, sampai "warisan" dari orang tua baik yang tergolong aktif maupun pasif.

Media massa sebenarnya sudah memaparkan perbedaan tipe penderita ini. Tetapi keberadaan penderita di tengah masyarakat bisa terpojok akibat ketakutan yang diakibatkan oleh komunikasi massa. Penderita yang mendapat penyakit dari cara hidup maupun melalui penularan "terwarisi", kiranya mengalami masalah yang sama. Keduanya dijauhi secara sosial, sebab ditakuti sebagai media dalam penularan.

Gerakan sosial untuk menanggulangi penyakit ini di luar negeri, sepanjang yang terbaca dari media massa, di antaranya untuk menumbuhkan simpati kepada penderita. Tidak dipersoalkan apakah penderita itu memperolehnya dari cara hidup atau akibat musibah. Kampanye gerakan ini tidak melihat penyebaran penyakit ini sebagai fenomena yang timbul dari cara hidup, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai budaya seksual. Kalaupun ada yang menyentuh cara hidup, hanya berupa kampanye penggunaan kondom bagi pelaku hubungan seksual terutama perilaku menyimpang. Artinya tidak ada pandangan normatif terhadap perilaku seksual, sebab tidak berkembang pandangan adanya perilaku menyimpang secara sosial.

Akar permasalahan yang dikaitkan dengan aspek medis tentunya sederhana saja, yaitu virus. Tetapi untuk melihatnya dalam kaitan dengan budaya, agaknya tidak sesederhana itu. Cara hidup sebagai penumbuh penyakit sudah sangat lama dikenal sebagai bagian kampanye kesehatan. Hidup bersih untuk menghindari muntaber, menjauhi pelacur agar tidak tertulari GO atau sipilis, dan sebagainya. Jika media bagi virus penyebab muntaber memang tempat yang kotor, dan media virus GO dan sipilis itu tidak diragukan lagi memang alat kelamin pelacur, maka kampanye mengenai cara hidup yang standar tentunya perlu dilancarkan terus-menerus.

Tetapi apa dan bagaimana cara hidup yang standar itu dalam konteks sosial dan budaya? Pertanyaan ini lebih sulit lagi dijawab manakala dikaitkan dengan masalah seksual. Budaya seksual dapat dilihat dari cara hidup yang memiliki pola tertentu. Dan ini bertolak dari nilai-nilai yang dianut dalam memandang masalah seksual. Dalam hubungan dengan masalah yang dibahas sekarang, tentunya lebih spesifik sebagai nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan seksual.

(2)

Membicarakan budaya seksual dapat dimulai dengan melihat kecenderungan umum dalam masyarakat. Ini artinya menempatkan masalah seks dalam skala makro. Sehingga dapat dibedakan dari masalah seks sebagai gejala mikro, yaitu gejala psikologis yang

* Disampaikan pada SEMINAR-LOKAKARYA KEWASPADAAN UNTUK MENCEGAH AIDS, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 18 Juni 1990

bersifat individual. Gejala psikologis individual ini ada yang diterima atau berkesesuaian dalam batas standar norma sosial, maupun penyimpangan dari standar normatif tersebut. Gejala psikologis individual dapat berpengaruh terhadap kecenderungan umum yang sifatnya makro, dan sebaliknya gejala makro ikut membentuk gejala psikologis individual.

Masalah "ayam dan telur" pada saat membahas gejala makro dan mikro dalam kehidupan sosial ini tak pernah mencapai kata putus. Tetapi setidaknya dapat dimulai dengan menangkap secara impresif perubahan kecenderungan budaya seksual dalam masyarakat kita.

Hal yang menonjol mungkin semakin permisifnya masyarakat kita dalam menghadapi masalah seks. Film "Malioboro" misalnya, menggambarkan sepasang muda-mudi mondok di rumah yang sama, si pemuda menjalankan fungsi tradisional seorang isteri. Sehari-hari dia menyiapkan keperluan pasangan serumahnya, bertengkar sebagaimana pasangan suami-isteri. Tetapi mereka belum menikah. Dan ibu si pemuda, diperlihatkan sering datang ke tempat mondok anaknya, dan hanya menegur tanpa aksentuasi yang keras, menyuruh pasangan tadi segera kawin. Masyarakat Yogyakarta menerima film tersebut sebagaimana menerima film-film lain yang menggambarkan hubungan seksual pra-nikah.

Kasus-kasus seksual kecuali perkosaan, yang sampai ke pengadilan, menunjukkan masalah yang dihadapi tidak dalam kaitan dengan moralitas sosial, tetapi bertolak dari pandangan pragmatis ekonomi. Tuntutan yang diajukan oleh penggugat, sebagaimana perkara perdata lainnya, adalah minta tunjangan atau ganti rugi. Hukum memang tidak melihat hubungan seksual sebagai penyimpangan sosial, kecuali yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan. Dan itu pun kalau ada pasangan perkawinan mengangkatnya sebagai delik hukum.

Istilah perzinahan yang berkonotasi moral dibicarakan dalam konteks agama. Dalam berbagai komunitas, konotasi semacam ini diterapkan dalam kehidupan sosial, kadang-kadang tekanan sosial dijalankan sebagai vonis dalam kasus perzinahan. Bentuk vonis yang dijalankan oleh komunitas sangat bervariasi. Mulai dari denda mengangkut batu untuk gedung balai desa, diarak keliling desa, sampai dipaksa menyajikan "live show". Tetapi semua bentuk vonis sosial ini dianggap menyimpang dari tatanan hukum formal.

Tekanan sosial yang menempatkan hubungan seksual di luar perkawinan sebagai penyimpangan sosial, agaknya sudah semakin berkurang. Hubungan seksual semacam ini baru menjadi masalah jika membawa konsekuensi yuridis, seperti lahirnya anak. Keadaan ini menuntut pengakuan ayah yang resmi. Lebih spesifik lagi tuntutan sosial-ekonomis dari ayah resmi yang dapat ditetapkan secara yuridis, dapat dilihat sebagai indikasi bagi lepasnya masalah hubungan seksual di luar perkawinan dari konteks moralitas etis. Moralitas yang berlaku hanya dalam konteks yuridis formal yang membawa konsekuensi ekonomis.

(3)

Keberadaan gejala hubungan seksual di luar perkawinan terlepas dari konteks moralitas agama dan sosial, dapat disebut sebagai pola perilaku yang khas dalam proses perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini lebih nampak lagi dengan kecenderungan menempatkan berbagai gejala dalam konteks ekonomi.

Jika moralitas yuridis formal digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan konteks ekonomi dari implikasi hubungan seksual di luar perkawinan, dalam kerangka lain hubungan seksual dapat dilihat sebagai komoditi yang bernilai ekonomis sepenuhnya. Penawaran komoditi seks merupakan gejala yang berkembang luas dalam pola kehidupan perkotaan. Mulai dari pengasong seks di pinggir jalan, pengasong melalui telepon, sampai yang dipusatkan di kompleks-kompleks khusus. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari pola pemenuhan hedonisme masyarakat kota.

Dalam kebudayaan kita kecenderungan menjadikan seks sebagai kegiatan untuk memenuhi hedonisme sudah tidak asing lagi. Sebelum komersialisme modern berkembang, pergundikan atau perseliran sudah dikenal, sebagai bentuk pemenuhan hedonisme kelas elit dalam masyarakat kita. Jika sekarang masyarakat mengenal format yang bervariasi dari gejala hubungan seksual yang dikomersialkan, ini sesuai dengan semakin rumitnya struktur sosial kita. Posisi seseorang dalam struktur sosial yang ditandai dengan tingkat kepemilikan dalam tatanan ekonomi (economical order) akan menentukan format komoditi seks yang dapat dibelinya.

Variasi komoditi seks ini mulai dari yang paling "wantah" terlihat di kompleks-kompleks pelacuran, sampai dengan berbagai bentuk yang lebih tersamar semacam panti pijat atau klub malam. Mulai dari transaksi yang bertarif dengan pengaturan oleh mucikari, sampai pentraktiran foto model, artis atau peragawati untuk "shopping" di Singapura. Mulai pereks siswa SLTA yang dijemput dari depan sekolahnya, sampai ibu rumah tangga yang menunggu order di salon atau fitness center.

Jika pada masa-masa sebelumnya wanita menjual seks hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada tahap primer atau sekunder. Dalam alam tradisional, wanita desa yang menjadi selir dari elit kerajaan, bisa mengangkat status sosial-ekonomi keluarga besar (extended family)nya di desa, bahkan juga mengangkat status sosial-budaya keluarganya. Meskipun selir memperoleh status yang relatif terhormat secara kebudayaan dibanding dengan wanita desa, tetapi substansi dari gejala ini dapat disebutkan, bagaimana seks kaum wanita dapat dijadikan faktor penyangga sosial-ekonomi.

Hal yang mirip juga dapat dijumpai dari kehidupan pelacur di kota. Sebagaimana tercatat dari salah satu kompleks pelacuran di Surabaya, rata-rata seorang pelacur menanggung 3 sampai 4 orang penduduk tidak produktif di desanya. Dengan kata lain, ketidak-produktifan penduduk desa (disebabkan lahan pertanian yang berkurang dan kapasitas untuk beralih lapangan kerja terbatas) ikut menjadikan pelacur di kompleks itu sebagai penyangga ekonomi extended familynya di desa. Hanya bedanya dari selir ndoro priyayi jaman dulu, kerja sebagai pelacur tidak dapat mengangkat status sosial-budaya keluarganya. Umumnya pelacur di kompleks itu mengaku bekerja sebagai pelayan toko atau pabrik di Surabaya, tidak ada yang sanggup berterus-terang sebagai pelacur.

Komoditi seks yang berkembang di kota-kota besar dengan berbagai macam kamufase, substansinya sama saja. Kalaupun mau dibedakan, dari dorongan ekonomis yang mendasari kegiatan itu, yaitu bukan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi sudah lebih jauh, yaitu pemenuhan sikap psikologis untuk hedonisme. Semua yang berlangsung sebenarnya hanya dorongan hedonisme yang bertemu tumbu dengan tutup. Berkembangnya komoditi seks ini pada satu pihak bisa dilihat karena dorongan untuk tingkat konsumsi yang semakin meningkat dari si penjual. Dorongan meningkatnya tingkat konsumsi ini mungkin disebabkan oleh terpaan media massa, yang menyebabkan pola-pola pemenuhan hedonisme menjadi mahal. Sementara pembelinya pun punya dorongan hedonisme yang menuntut komoditi seks yang semakin variatif.

(4)

Perubahan kebudayaan yang mungkin dapat dicatat dalam hubungan dengan nilai seksual adalah perkembangan dari gerakan feminisme yang anti genderisme. Gerakan ini bertujuan baik, menegakkan keberadaan manusia yang tidak diskriminatif akibat perbedaan seks. Dalam struktur sosial yang didominasi oleh pria, kaum wanita bisa menerima perlakuan diskriminatif, atau bahkan menjadi obyek eksploitatif. Tetapi gerakan ini tidak hanya menjadi faktor untuk merombak struktur dan nilai sosial. Lebih jauh, resonansinya bermunculan dalam berbagai fashion semacam pakaian dan asesoris uniseks, dan beberapa cara berperilaku (manners) yang diorientasikan kepada keseragaman seks. Ekseks dari resonansi ini adalah berkembangnya perilaku yang berorientasi kepada peniruan seks yang

tidak dimiliki, wanita bergaya pria, pria bergaya wanita. Kemunculan gejala lesbian dan gay di kota-kota besar bisa disebut sebagai ekses yang bermula dari perilaku yang modis. Ini berbeda dengan gejala psikologis yang individual.

Sejak zaman dulu, kebudayaan kita mengenal sub-budaya pendekar atau warok dengan hubungan seksual sejenis (gemblak). Tetapi sub-budaya ini biasanya terlokalisasi dalam lingkup terbatas. Sebab tidak setiap orang bisa menjadi pendekar, dan dorongan untuk hubungan seksual sejenis ini agaknya memiliki konteks budaya.

Sedang hubungan seksual sejenis yang berkembang di kota-kota besar bersamaan dengan tumbuhnya gaya hidup yang hedonistik. Penyebaran pola hubungan seksual ini dapat meluas mengingat tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Interaksi antar-bangsa juga semakin intensif. Dambaan akan devisa dari pariwisata bukan hanya berlangsung secara makro, yaitu oleh pemerintah. Tetapi juga secara mikro, yaitu oleh individu yang sudah siap dengan nilai-nilai seksual yang sesuai.

(5)

Perubahan dalam nilai dan perilaku seksual dalam masyarakat kita bertolak dari berbagai faktor yang tidak terelakkan, yaitu proses komersialisme. Ini ongkos yang harus kita terima saat kita mengorientasikan seluruh struktur sosial kita untuk mensukseskan pembangunan ekonomi.

Berbagai pola hubungan seksual yang berkembang dalam masyarakat, saling bertalian satu sama lain. Ketika kita risau dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, untuk mengatasinya di antaranya kita mengkampanyekan kondom. Kampanye benda ini sebenarnya menempatkan hubungan seksual sebagai proses, dilepaskan dari konteks tujuan hubungan seksual itu. Benda yang sama dapat digunakan untuk proses hubungan seksual dengan tujuan apa pun. Sebenarnya kita sedang mendidik masyarakat agar menempatkan hubungan seksual secara pragmatis, bukan dalam kaitan dengan nilai-nilai kebudayaan. Manakala pragmatisme ekonomi yang dominan, keberadaan hubungan seksual akan dilihat dari sisi ini.

Jika ahli medis sudah memastikan bahwa penularan utama penyakit AIDS adalah dari hubungan seksual, masalah besar yang dihadapi adalah membangun budaya seksual yang sesuai dengan standar kesehatan. Anjuran yang paling sering terdengar, serupa dengan pencegahan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seksual, seperti jangan berganti-ganti pasangan, tidak berhubungan dengan pelacur. Tetapi hubungan seksual di luar perkawinan tetap berkembang jua.

Informasi tentang penyakit AIDS lebih mengerikan dibanding dengan penyakit-penyakit akibat hubungan seksual yang sudah populer selama ini. Ancaman bahaya penyakit ini tentunya sudah diketahui terutama oleh masyarakat perkotaan yang umumnya terekspose oleh media massa. Cuma masih menjadi tanda tanya apakah informasi yang diperoleh dari media massa, dapat mengatasi proses komersialisme yang telah mengubah orientasi dan nilai budaya masyarakat kita.

Uraian di atas tidak memberi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana biasa, masalah kebudayaan memang tidak bisa diselesaikan dengan resep berupa suatu strategi. Selama proses perkembangan masyarakat kita ditentukan oleh strategi yang bertolak dan bertujuan ekonomi, tentulah tidak relevan untuk membicarakan strategi kebudayaan. Kalaupun ada yang dapat dilakukan, adalah memberi anjuran yang bersifat mikro, yaitu kepada anggota masyarakat. Setidaknya kita telah berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk budaya seksual masyarakat, terutama di perkotaan.
